



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

Melayani dengan Hati,
Mewujudkan Bulungan Maju dan Berkelanjutan

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI

MATA ASMARA

(Optimalisasi Tata Kelola Aspirasi Masyarakat
Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Bulungan)



SERAP ASPIRASI

Menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan terbuka saat masa reses



KELOLA & KLASIFIKASI

Mengelola, memverifikasi, dan mengklasifikasikan aspirasi secara sistematis



INTEGRASI & PRIORITAS

Memetakan prioritas usulan dan mengintegrasikannya dalam perencanaan pembangunan



TINDAK LANJUT

Koordinasi dengan perangkat daerah untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat



MONITORING & TRANSPARANSI

Memantau perkembangan dan memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat



Aspirasi Anda, Prioritas Pembangunan Daerah
Bersama Membangun Bulungan yang Lebih Baik



PARTISIPATIF

Mendorong partisipasi aktif masyarakat



AKUNTABEL

Pengelolaan aspirasi tertib dan dapat dipertanggungjawabkan



RESPONSIF

Tindak lanjut cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat



KOLABORATIF

Sinergi DPRD, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat



BERORIENTASI HASIL

Aspirasi menjadi dasar perencanaan pembangunan yang berkualitas

TAHUN
2026

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masa reses merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihannya. Melalui kegiatan reses, masyarakat dapat menyampaikan berbagai kebutuhan, permasalahan, serta usulan pembangunan yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.

Namun demikian, pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat selama masa reses masih menghadapi berbagai tantangan. Aspirasi yang disampaikan sering kali belum terdokumentasi secara sistematis, terdapat usulan yang berulang dari tahun ke tahun, proses verifikasi dan klasifikasi usulan belum terintegrasi, serta belum optimalnya koordinasi antara DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat dalam menindaklanjuti hasil reses. Selain itu, masyarakat juga masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi mengenai perkembangan tindak lanjut terhadap aspirasi yang telah disampaikan.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aspirasi masyarakat, diperlukan suatu inovasi yang mampu mengintegrasikan proses pencatatan, verifikasi, klasifikasi, pemetaan prioritas, hingga monitoring tindak lanjut aspirasi secara transparan, akuntabel, dan berbasis data. Inovasi tersebut diharapkan dapat menjadi media yang memperkuat sinergi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif.

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dikembangkan inovasi **MATA ASMARA (Optimalisasi Tata Kelola Aspirasi Masyarakat Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan)**. Inovasi ini merupakan sistem pengelolaan aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk memastikan seluruh usulan masyarakat terdokumentasi dengan baik, diverifikasi sesuai kewenangan, diprioritaskan berdasarkan kebutuhan, serta dipantau proses tindak lanjutnya secara berkelanjutan.

Melalui **MATA ASMARA**, diharapkan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan pada masa reses dapat menjadi masukan yang berkualitas dalam proses perencanaan pembangunan daerah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat hubungan antara DPRD dan masyarakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Tujuan

Pelaksanaan Inovasi **MATA ASMARA** bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas tata kelola aspirasi masyarakat pada masa reses DPRD.

2. Mewujudkan sistem pendokumentasian aspirasi yang tertib, akurat, dan terintegrasi.
3. Mempermudah proses verifikasi, klasifikasi, dan pemetaan usulan masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi antara DPRD, perangkat daerah, dan pemangku kepentingan dalam menindaklanjuti aspirasi.
5. Meningkatkan transparansi terhadap proses tindak lanjut hasil reses.
6. Menghindari duplikasi usulan pembangunan melalui basis data aspirasi yang terintegrasi.
7. Mendukung penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
9. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan masa reses DPRD.
10. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

3. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Inovasi **MATA ASMARA** meliputi:

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan.
2. Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan.
3. Perangkat Daerah sebagai pelaksana tindak lanjut hasil reses.
4. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
5. Masyarakat sebagai penyampai aspirasi.
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan data aspirasi masyarakat.
7. Meningkatnya koordinasi antarinstansi dalam menindaklanjuti hasil reses.
8. Meningkatnya transparansi pelaksanaan tindak lanjut aspirasi.
9. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat.
10. Terwujudnya pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP INOVASI

Ruang lingkup pelaksanaan Inovasi **MATA ASMARA** meliputi:

1. Pengelolaan Aspirasi

- Penerimaan aspirasi masyarakat.
- Pendokumentasian hasil reses.
- Digitalisasi data aspirasi.
- Pengarsipan dokumen.

2. Verifikasi dan Klasifikasi

- Verifikasi kelengkapan usulan.
- Identifikasi kewenangan.
- Klasifikasi berdasarkan sektor pembangunan.
- Penentuan tingkat prioritas.

3. Integrasi Data

- Penyusunan basis data aspirasi.
- Sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah.
- Integrasi dengan sistem informasi pemerintahan daerah.
- Penyajian data dan laporan.

4. Monitoring Tindak Lanjut

- Pemantauan progres penyelesaian aspirasi.
- Koordinasi dengan perangkat daerah.
- Penyampaian informasi perkembangan kepada masyarakat.
- Evaluasi tindak lanjut hasil reses.

5. Sosialisasi dan Partisipasi

- Sosialisasi mekanisme penyampaian aspirasi.
- Edukasi kepada masyarakat.
- Forum konsultasi publik.
- Penguatan komunikasi DPRD dengan masyarakat.

6. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring pelaksanaan inovasi.
- Evaluasi efektivitas pengelolaan aspirasi.
- Penyusunan laporan berkala.
- Penyempurnaan sistem pengelolaan aspirasi.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Tahap Persiapan

- Pembentukan Tim Pelaksana.
- Penyusunan pedoman pelaksanaan.
- Penyusunan format pengelolaan aspirasi.
- Sosialisasi kepada DPRD dan perangkat daerah.

2. Tahap Pengumpulan Aspirasi

- Pelaksanaan reses.
- Pencatatan seluruh aspirasi masyarakat.
- Dokumentasi kegiatan.
- Input data ke dalam sistem.

3. Tahap Verifikasi dan Analisis

- Verifikasi usulan.
- Pengelompokan berdasarkan urusan pemerintahan.
- Penetapan prioritas.
- Penyusunan rekomendasi.

4. Tahap Tindak Lanjut

- Penyampaian hasil kepada perangkat daerah.
- Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut.
- Monitoring perkembangan penyelesaian.
- Publikasi informasi kepada masyarakat.

5. Tahap Monitoring

- Monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
- Monitoring kualitas pelayanan.
- Monitoring kepuasan masyarakat.

6. Tahap Evaluasi

- Evaluasi efektivitas inovasi.
- Evaluasi kualitas pengelolaan aspirasi.
- Penyusunan rekomendasi penyempurnaan.
- Pengembangan sistem secara berkelanjutan.

Alur Pelaksanaan

Persiapan



Pengumpulan Aspirasi Masa Reses



Verifikasi dan Analisis



Tindak Lanjut oleh Perangkat Daerah



Monitoring



Evaluasi dan Penyempurnaan

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN

Untuk mengukur efektivitas inovasi, berikut adalah indikator utama yang harus dicapai:

NO	INDIKATOR	TARGET
1	Aspirasi masyarakat yang terdokumentasi dalam sistem	100%
2	Aspirasi yang diverifikasi sesuai kewenangan	≥ 95%
3	Aspirasi yang diklasifikasikan berdasarkan sektor pembangunan	100%
4	Aspirasi yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah	≥90%
5	Penyampaian laporan hasil reses tepat waktu	≥ 95%
6	Tingkat koordinasi antarinstansi dalam tindak lanjut aspirasi	Sangat Baik
7	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan aspirasi	≥90% puas
8	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi	100%
9	Penurunan usulan yang berulang akibat data yang tidak terdokumentasi	≥50%
10	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan berbasis aspirasi masyarakat	Terwujud

Keberhasilan inovasi juga ditandai dengan:

- Meningkatnya kualitas tata kelola aspirasi masyarakat.
- Terbangunnya sistem dokumentasi aspirasi yang transparan dan terintegrasi.
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap DPRD dan Pemerintah Daerah.
- Meningkatnya efektivitas pelaksanaan masa reses.
- Meningkatnya sinergi antara DPRD, perangkat daerah, dan masyarakat.
- Terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

Inovasi **MATA ASMARA (Optimalisasi Tata Kelola Aspirasi Masyarakat Masa Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan)** merupakan wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan masa reses melalui pengelolaan aspirasi masyarakat yang lebih sistematis, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Inovasi ini memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat terdokumentasi, diverifikasi, diprioritaskan, serta ditindaklanjuti secara tepat sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Keberhasilan implementasi **MATA ASMARA** memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta masyarakat. Kolaborasi yang baik akan memperkuat mekanisme penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui penerapan **MATA ASMARA**, diharapkan proses penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat pada masa reses menjadi lebih efektif, efisien, dan terukur. Aspirasi masyarakat tidak hanya menjadi dokumen administrasi, tetapi menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bulungan.

Pedoman Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh pelaksana dalam mengimplementasikan **MATA ASMARA** secara konsisten, profesional, dan berkelanjutan, sehingga mampu mewujudkan **tata kelola aspirasi masyarakat yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta pembangunan Kabupaten Bulungan yang maju dan berkelanjutan.**